



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

HILIRISASI SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN DENGAN MEMBERDAYAKAN KOPERASI NELAYAN

Riyadi Santoso

Analisis Kebijakan Ahli Madya

riyadi.santoso@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Indonesia adalah negara maritim yang memiliki potensi perekonomian dari sektor perikanan dan kelautan yang sangat besar. Untuk mengelola potensi tersebut, pemerintah menerapkan konsep ekonomi biru. Dalam ekonomi biru, ada lima kebijakan yang menjadi *roadmap* pengelolaan sektor perikanan dan kelautan yaitu: (1) perluasan target kawasan konservasi perairan; (2) penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota; (3) pengembangan budidaya perikanan ramah lingkungan khususnya untuk komoditas unggulan ekspor (udang, kepiting, rumput laut, dan lobster); (4) pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta (5) penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut.

Perikanan merupakan sektor unggulan nasional dan Indonesia adalah negara peringkat kedua penghasil produk perikanan terbesar di dunia setelah Tiongkok. Nilai ekspor perikanan Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nilai ekspor perikanan Indonesia tahun 2022 mencapai 6,24 miliar USD. Naik 0,52 miliar USD dibandingkan tahun 2021, yaitu 5,72 miliar USD. Bahkan, untuk tahun 2023 Menteri KKP menargetkan ekspor hasil perikanan diperkirakan bisa mencapai 7,66 miliar USD atau setara dengan 116,1 triliun rupiah.

KKP mengungkapkan bahwa program-program ekonomi biru mampu memacu tumbuhnya industri hilirisasi sektor perikanan di Indonesia. Melalui salah satu kebijakan dalam ekonomi biru, yaitu penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota, nantinya kapal harus berangkat dan mendaratkan hasil tangkap di pelabuhan yang sama dan ikan tidak boleh dipindahkapi sebelum didaratkan untuk dihitung. *Multiplyer effect* yang dihasilkan dari kebijakan ini besar sekali. Melalui kebijakan ini akan muncul unit pengolahan ikan di sekitar pelabuhan, usaha distribusi produk perikanan, serta usaha-usaha lain yang akan menyokong produktivitas perikanan di wilayah tersebut. Secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi muncul di wilayah tersebut. Melalui kebijakan ekonomi biru ini, distribusi pertumbuhan ekonomi terjadi dan tidak lagi terpusat hanya di Pulau Jawa.

Hilirisasi industri perikanan tidak hanya akan terjadi terhadap industri perikanan tangkap, akan tetapi juga subsektor perikanan budidaya. Saat ini KKP tengah membangun model tambak udang berkelanjutan di Kebumen, Jawa Tengah, berisi 149 petak tambak di lahan seluas 69 hektar. Produktivitas per hektar pada tambak tersebut mencapai 40 ton per tahun dan mampu memberikan nilai ekonomi sebesar 400 miliar rupiah. Selain di Kebumen, model tambak serupa akan dibangun di wilayah lain untuk menggenjot produksi udang nasional yang ditargetkan mencapai 2 juta ton pada tahun 2024. Hilirisasi juga diupayakan terhadap budi daya rumput laut.

Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik menilai bahwa hilirisasi perikanan merupakan solusi tepat untuk meningkatkan nilai tambah produk

perikanan. Selama ini titik berat pengembangan sektor perikanan masih sebatas produksi, belum pada peningkatan nilai tambah. Akan tetapi, hilirisasi sektor perikanan tidak boleh melupakan persoalan hulunya, yang sudah berpuluh tahun banyak persoalannya dan tidak kunjung dibenahi. Mulai dari pencemaran wilayah pesisir, sumber daya perikanan yang makin menipis akibat *illegal fishing*, *destructive fishing*, juga masalah armada perikanan yang belum banyak terutama di zona ekonomi eksklusif. Sampai pada persoalan klasik, nelayan kecil sulit mengakses bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut. Survei KNTI tahun 2021-2022 memperlihatkan lebih dari 80 persen nelayan kecil tidak mendapatkan akses BBM bersubsidi. Padahal, BBM merupakan kebutuhan dasar untuk melaut. Oleh karena itu, strategi industrialisasi perikanan memerlukan pembenahan dari hulu hingga hilir.

Hilirisasi sektor perikanan diharapkan juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan ini dapat dilakukan dengan memberdayakan koperasi nelayan, yaitu melalui kolaborasi koperasi nelayan dan investor dalam rantai pasok hilirisasi industri perikanan. Dengan demikian, para nelayan perlu didorong untuk bergabung dalam koperasi agar nelayan kecil mempunyai akses untuk memperoleh sarana, perbekalan melaut, hingga permodalan. Saat ini KNTI sedang menginisiasi penguatan kelembagaan koperasi nelayan di 15 lokasi, antara lain di Aceh Besar (Aceh); Tanjung Balai, Deli Serdang, dan Medan (Sumut); Indramayu (Jawa Barat); Semarang, Pekalongan, Pemalang, dan Demak (Jawa Tengah); Surabaya, Gresik (Jawa Timur); Lombok Timur dan Lombok Utara (NTB); dan Manggarai Barat (NTT). Dengan penguatan kelembagaan koperasi nelayan tersebut tentunya mereka akan mempunyai daya saing dan posisi tawar yang lebih kuat, mengingat dari 2,1 juta nelayan di Indonesia, 90 persennya merupakan nelayan kecil dan tradisional.

Atensi DPR

Kebijakan hilirisasi di sektor perikanan dan kelautan berpotensi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Melalui kebijakan ini, berbagai produk perikanan akan memiliki nilai tambah. Akan tetapi, kebijakan tersebut harus berdampak terhadap kesejahteraan nelayan. Untuk itu, pemberdayaan koperasi nelayan sebagai penyangga usaha sangat diperlukan. Sehubungan dengan itu, diperlukan dukungan dan perhatian dari DPR RI, khususnya Komisi IV, yang membidangi sektor perikanan dan kelautan dengan melakukan pengawasan dan dorongan terhadap pemerintah dalam upaya hilirisasi industri sektor ini tanpa melupakan berbagai upaya pembangunan sisi hulu dari sektor perikanan. Penguatan kelembagaan koperasi nelayan sangat diperlukan sehingga nelayan mempunyai daya tawar dan daya saing dalam pembangunan industri perikanan.

Sumber

Kompas, 9 dan 14 Februari 2023; dan
Neraca.co.id, 15 Februari 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.